

## **Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Gender, Jenis Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan**

Hana Salsabila<sup>1</sup>, Desi Handayani<sup>2</sup>, Randy Heriyanto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang

Email: [hanasalsabila444@gmail.com](mailto:hanasalsabila444@gmail.com)

<sup>2</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang

Email: [ci\\_e@yahoo.com](mailto:ci_e@yahoo.com)

<sup>3</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang

Email: [randy@pnp.ac.id](mailto:randy@pnp.ac.id)

---

### **ABSTRACT**

*In contrast to previous research which discussed the factors that influence taxpayer compliance, this study will measure how differences in the level of individual taxpayer compliance are based on the factors that influence it. This difference is measured using the variables gender, type of work and educational level of taxpayers registered at KPP Pratama Padang Satu. The data collection method used in this study was a questionnaire. The population of this study is taxpayers registered at KPP Pratama Padang Satu, with 100 respondents. While the method of data analysis and hypothesis testing used independent t-test and Kruskal Wallis. The result of this study is proves that there is no difference between female and male taxpayers in fulfilling individual taxpayer compliance. This study proves that there are differences between employee and non-employee taxpayers in fulfilling individual taxpayer compliance. This study proves that there are differences between taxpayers with high school education, Associate's degree, Bachelor degree, and Masters education levels in fulfilling individual taxpayer compliance. This research is expected to make a practical contribution to the government to provide socialization to taxpayers to be more obedient in paying taxes.*

**Keywords:** Gender, Type of Work, Level of Education, Tax Compliance

### **ABSTRAK**

*Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, penelitian ini akan mengukur bagaimana perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan faktor yang mempengaruhinya. Perbedaan ini diukur dengan menggunakan variabel gender, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu, dengan jumlah responden 100 orang. Sedangkan metode analisis data dan uji hipotesis digunakan uji t-test independen dan kruskal wallis. Hasil dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa tidak ada perbedaan antara wajib pajak perempuan dan laki-laki dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan antara wajib pajak karyawan dengan non-karyawan dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan antara wajib pajak yang berpendidikan SMA-Sederajat, Diploma 3, Sarjana atau*

*Diplom 4, dan tingkat pendidikan Magister dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak.*

**Kata kunci:** Gender, Jenis Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

---

## Pendahuluan

Sampai saat ini isu rendahnya kepatuhan wajib pajak masih menjadi faktor utama tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara. Berbagai kolaborasi dan inovasi kebijakan. Mulai dari kebijakan pengampunan pajak, pemberian sanksi dan kebijakan lainnya. Banyak faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak seseorang, baik dari diri wajib pajak sendiri maupun dari lingkungan perpajakan, salah satunya pemahaman terhadap *self assessment system*. Pemahaman ini sangat berpengaruh bagi kepatuhan wajib pajak, dimana peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan terjadi dikarenakan adanya peningkatnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap *self assessment system*. Faktor individual yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* sangat terkait dengan karakteristik seorang wajib pajak, seperti gender, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan wajib pajak [3].

Variabel gender sering dijadikan faktor yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak seseorang, namun dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa variabel gender memberikan hasil yang tidak konsisten, seperti pendapat Suryati [9] yang menyatakan bahwa variabel gender mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan waji pajak. Ia berpendapat bahwa perempuan akan lebih patuh dibandingkan laki-laki walaupun belum banyak riset yang membuktikan hal tersebut. Namun hal sebaliknya bisa terjadi, laki-laki akan lebih patuh dibandingkan perempuan dimana hal tersebut terjadi dikarenakan kebutuhan seorang perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, sehingga mereka akan mengesampingkan kewajiban mereka yang membuat mereka tidak patuh. Pendapat ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha [6] yang berpendapat bahwa gender tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak seseorang. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan senantiasa menaati kewajiban sebagai warga Negara dan tunduk kepada undang-undang terlepas dari faktor yang menunjukkan ia seorang laki-laki maupun perempuan.

Menurut Fitriyani et.al [3] iklim yang tercipta dalam sebuah perusahaan akan memberikan karakteristik yang membedakan organisasi tersebut dengan yang lain, dengan memengaruhi individu didalamnya dan akan bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, dengan begitu lingkungan kerja dapat mempengaruhi psikologis pekerja. Ini akan membuat sikap wajib pajak yang bekerja kepada pemberi kerja terhadap self assessment system akan menyesuaikan dengan karakteristik pimpinan. Begitu juga halnya dengan pendapat Naufal dan Setiawan [12] yang mengatakan bahwa pekerja yang berkerja sebagai karyawan dan PNS akan lebih patuh dibandingkan dengan non-karyawan. Hal ini dikarenakan gaji yang diberikan kepada wajib merupaka gaji yang telah dipotong langsung oleh pemberi kerja, dan tentunya para pemberi kerja akan mewajibkan pekerjaanya untuk melaporkan SPT mereka tepat waktu, dan menjadikan ketepatan waktu tersebut sebagai komponen penilaian

kinerja. Sehingga timbulah perbedaan kepatuhan wajib pajak yang berkerja sebagai karyawan dengan non-karyawan.

Tingkat pendidikan merupakan tahap pendidikan formal yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan kemauan serta membentuk sikap dan karakter suatu individu. Dengan pendidikan seseorang akan lebih mudah untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan formal akan membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru. Dengan begitu individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih paham dan mengerti akan kewajiban perpajakan mereka. Namun tidak dapat dipastikan juga bahwa orang yang berpendidikan tinggi akan patuh dengan kewajibannya, dimana mereka akan berusaha mencari celah dan kelengahan pajak untuk menghindari pembayaran pajak [9]. Pendapat ini hampir sejalan dengan Handayani [5] yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang berbeda tidak akan membedakan kepatuhan wajib pajak. Kurangnya sosialisasi yang merata merupakan salah satu penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan pajak. Ketidakteraturan tersebut tentu akan menyebabkan tingkat nasionalisme dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan juga berbeda beda. Individu yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan pengetahuan pajak yang cukup akan tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka dikarenakan kurangnya rasa nasionalisme dan kepercayaan terhadap pemerintah. Begitu juga sebaliknya tingkat pendidikan individu yang rendah namun memiliki rasa nasionalisme dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah akan tetap membayar pajak mereka. Kondisi ini mencerminkan tinggi rendahnya pendidikan seseorang tidak menjamin kepatuhan perpajakan seseorang.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Teori Atribusi**

Pada dasarnya teori atribusi menjelaskan tentang bagaimana orang lain menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap orang lain. Teori atribusi adalah teori kepatuhan wajib pajak terkait dengan perilaku wajib pajak dalam menilai pajak itu sendiri dan bagaimana perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakannya yang timbul karena adanya faktor internal yang timbul dibawah kendali individu tersebut, atau faktor eksternal yang dipengaruhi dari luar yang harus memaksa individu tersebut melakukan karena situasi.

Seperti yang kita tahu gender berhubungan erat dengan peran dan tanggung jawab, baik dari segi laki-laki maupun perempuan. Perbedaan bagaimana laki-laki dan perempuan dalam menyelesaikan tanggung jawab dan peran mereka, merupakan akibat dari perbedaan respon yang diterima antara laki-laki dan perempuan. Verbal center yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dimana perempuan memiliki verbal center di kedua bagian otak sedangkan laki-laki hanya dibagian otak kiri, hal ini membuat perempuan dapat menyerap informasi dan menyimpulkan sesuatu lima kali lebih cepat dibandingkan laki-laki. Hal ini juga menjadikan alasan bahwa perempuan lebih mengandalkan perasaan [8]. Sehingga wajib pajak laki-laki akan menjadi patuh dalam membayar pajak berlandaskan ketakutan akan sanksi yang diterima, sedangkan wajib pajak perempuan berlandaskan hati nurani dan memiliki

rasa bersalah jika membayar pajak tidak sesuai dengan ketentuan [9]. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis pertama, yaitu:

H1: Terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak berdasarkan gender

Jenis pekerjaan tidak hanya berhubungan dengan pendapatan seseorang namun juga berhubungan dengan sistem dan cara kerja pemimpin yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Hal ini tentu akan memberikan perbedaan antara wajib pajak yang berkerja sebagai karyawan dengan wajib pajak yang non-karyawan. Bisa dikatakan bahwa karyawan akan lebih patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya karena adanya pelaporan dari pihak ketiga. Sedangkan non-karyawan akan lebih mudah menghindari pajak dibandingkan karyawan [9]. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis kedua yaitu:

H2: Terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak berdasarkan jenis pekerjaan

Perbedaan tingkat pendidikan antara wajib pajak yang berpendidikan lebih rendah dengan yang lebih tinggi, akan memberikan wawasan, cara berfikir, sikap dan perilaku yang berbeda. Penyerapan informasi dan pengimplementasian dalam perilaku dan gaya hidup yang mudah dilakukan merupakan keuntungan yang didapat ketika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan begitu pengetahuan kewajiban perpajakan dan manfaat membayar pajak akan lebih diketahui oleh orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi [9]. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis ketiga yaitu:

H3: Terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan adanya perbedaan gender, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan pada wajib pajak di atas, penulis tertarik untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan gender, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan di wilayah kerja KPP Pratama Padang Satu. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

1. Untuk menguji secara empiris bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan gender di KPP Pratama Padang I
2. Untuk menguji secara empiris bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan jenis pekerjaan di KPP Pratama Padang I
3. Untuk menguji secara empiris bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan tingkat pendidikan di KPP Pratama Padang I

Dari pemaparan di atas dirumuskanlah hipotesis untuk penelitian ini, yaitu:

## Metode Penelitian

Desain pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan populasi data yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Pemilihan populasi ini didasari oleh wilayah kerja yang mudah di jangkau oleh peneliti, sehingga peneliti dapat mengumpulkan sampel data dengan mudah. Berdasarkan data tahun 2020 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu adalah 259.757 orang. Adapun sample yang digunakan sebanyak 100 orang menggunakan rumus *slovin*. Berikut perhitungan jumlah sample yang akan digunakan:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{259.757}{1 + 259.757 (0,1)^2}$$

$$n = 99,96$$

n = jadi sampel dari penelitian ini adalah 100 sampel

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner dan teknik kepustakaan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gender, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang berbeda merupakan konsep gender secara umum, dimana perbedaan ini diciptakan dan diimplementasikan dalam keluarga dan budaya masyarakat bagaimana menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang perempuan [2].

Perbedaan jenis pekerjaan akan memberikan perbedaan terhadap sikap seseorang dalam memenuhi kewajiban mereka. Perbedaan ini bisa terjadi karena kecendrungan karyawan untuk menyesuaikan karakteristik pemimpinnya. Perbedaan ini juga terjadi atas dasar tetap atau tidaknya pekerjaan seseorang. Mereka akan lebih taat dan disiplin dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak ketika mereka mempunyai pekerjaan yang jelas, terlepas dari semua kebutuhan ekonomi yang sudah terpenuhi [7].

Proses belajar, mengajar dalam pembentukan pola kelakuan manusia yang dapat diterima masyarakat merupakan pengertian dari pendidikan. Pendidikan berhubungan dengan transmisi keterampilan, pengetahuan dan hal-hal yang berkaitan dengan kelakuan lainnya pada generasi muda. Pendidikan juga berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan peserta didik [1].

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai aturan-aturan dimana wajib pajak menggunakan hak perpajakannya dan tindakannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada dua jenis kepatuhan: kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Kepatuhan formal adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk mematuhi kondisi normal dan rutin sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan materil adalah tindakan wajib pajak yang secara substansial mematuhi semua peraturan dan aturan substantif perpajakan sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan [1]. Salah satu bentuk kepatuhan formal seperti ketentuan batas waktu penyampaian SPT. Sedangkan kepatuhan materil seperti memenuhi syarat material dalam mengisi SPT tahunan yaitu mengisi dengan keadaan yang sebenarnya, lengkap, sesuai dengan ketentuan [10]. Kepatuhan wajib pajak yang akan diteliti adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi formal yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu, dimana salah satu indikator kepatuhan wajib pajak formal adalah penyampaian

laporan pajak melalui surat pemberitahuan (SPT). Adapun operasional dari variabel, dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Operasional Variabel

Nama Variabel	Pertanyaan	Skala	Rujukan
Identitas Responden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laki-laki</li> <li>• Perempuan</li> </ul>	Pilihan	Pertanyaan ini dikembangkan oleh penulis untuk memudahkan penulis dalam memenuhi data
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karyawan</li> <li>• Non-karyawan</li> </ul>	Pilihan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S3</li> <li>• S2</li> <li>• Sarjana/Diploma4</li> <li>• Diploma 3</li> <li>• SMA/SMK/MA-Sederajat</li> <li>• SMP/MTs-Sederajat</li> <li>• SD/MI-Sederajat</li> </ul>	Pilihan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah saudara memiliki NPWP?</li> </ul>	Pilihan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 digit terakhir nomor NPWP?</li> </ul>		
	Tingkat Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah saudara tahu batas pembayaran dan pelaporan pajak tahunan?</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapan saudara membayar dan melaporkan pajak tahunan?</li> </ul>		Guttman	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darimana saudara tahu harus lapor sebelum tanggal jatuh tempo?</li> </ul>		Pilihan	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah saudara tahu bahwa terdapat sanksi jika terlambat melakukan pembayaran atau pelaporan pajak?</li> </ul>		Guttman	

Uji instrument penelitian dilakukan untuk menguji alat ukur yang digunakan. Uji instrumen yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian layak dipakai dalam penelitian atau tidak dimana instrument penelitian yang digunakan yaitu kuesioner. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang digunakan sudah layak dalam mengungkapkan sesuatu yang akan diukur atau biasa disebut dengan kuesioner yang sudah valid dan sah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan dalam kuesioner dapat mengukur dengan sebenarnya variabel yang akan diukur [4]. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur reliabilitas suatu kuesioner

dimana hal itu dapat dibuktikan dengan jawaban seseorang terhadap pernyataan yang konsisten dan stabil dari waktu ke waktu.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan dapat menggunakan analisis data. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah T-test independen dan kruskal wallis. Uji T-test independen digunakan untuk menguji perbedaan dua kelompok sampel yang saling tidak berhubungan. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel dengan standar eror dari perbedaan rata-rata sampel yang tidak berhubungan tersebut. Uji kruskal wallis adalah uji yang dilakukan untuk menguji perbedaan antara lebih dari dua kelompok sampel yang saling bebas atau tidak berhubungan. Dengan kata lain nilai rata-rata tiga atau lebih sampel yang tidak saling berhubungan ini akan dianalisis menggunakan uji kruskal wallis [4]. Uji ini dapat dilakukan sebagai uji alternatif jika data tidak terdistribusi normal pada uji one way ANOVA.

## Hasil Dan Pembahasan

### Deskripsi Responden

Penelitian ini dilakukan untuk menguji perbedaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan gender, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan di wilayah KPP Pratama Padang Satu. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah KPP Pratama Padang Satu. Berikut dijelaskan mengenai deskripsi dari responden dalam penelitian ini. Karakteristik responden berdasarkan gender pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

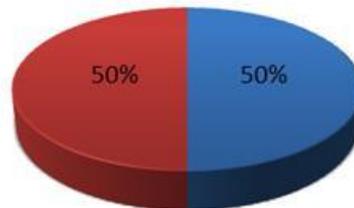


Gambar 1 Karakteristik Responden berdasarkan Gender

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa peneliti membagi responden secara merata yaitu 50 orang responden berjenis kelamin perempuan (50%) dan 50 orang berjenis kelamin laki-laki (50%). Identitas responden berdasarkan jenis pekerjaan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Jenis Pekerjaan

■ Karyawan ■ No -karyawan

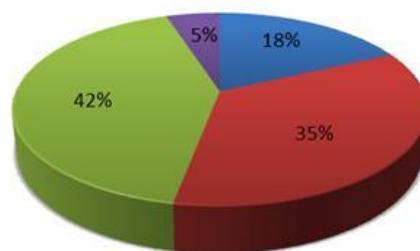


Gambar 2 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa peneliti membagi responden menjadi dua kelompok yaitu 50 orang responden bekerja sebagai karyawan (50%) dan 50 orang berkerja sebagai non-karyawan (50%). Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tingkat Pendidikan

■ SMA-Sederajat ■ Diploma 3 ■ Sarjana/Diploma 4 ■ Magister



Gambar 3 Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang memiliki tingkat pendidikan sarjana/diploma 4 yaitu sebanyak 42 orang (42%), kemudian tingkat pendidikan diploma 3 sebanyak 35 orang (35%), tingkat pendidikan SMA-Sederajat sebanyak 18 orang (18%), dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 5 orang (5%).

## Uji Instrumen Penelitian

### Uji validitas

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat uji validitas kuesioner penelitian seperti tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil uji validitas

Pertanyaan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
Pertanyaan 1	0,838	0,197	Valid
Pertanyaan 2	0,790	0,197	Valid
Pertanyaan 3	0,772	0,197	Valid

Sumber: Olahan data (2022)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 2 di atas didapatkan nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  sebesar 0,197, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanyaan terkait kepatuhan wajib pajak pada kuesioner tersebut dinyatakan valid.

### Uji reliabilitas

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat uji reliabilitas kuesioner penelitian seperti tabel berikut ini:

Tabel 3. Hasil uji reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Item
0,719	3

Sumber: Olahan data (2022)

Hasil dari uji reliabilitas di atas didapat koefisien *Cronbach's Alpha* sebesar 0,719. Koefisien tersebut bernilai  $\geq 0,7$ , hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan sudah reliable.

### Uji Hipotesis

#### Uji beda t-test independen

Pada penelitian ini uji t-test dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bergender perempuan dengan wajib pajak orang pribadi yang bergender laki-laki. Uji t-test ini juga dilakukan untuk melihat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan jenis pekerjaan sebagai karyawan dengan wajib pajak orang pribadi yang berkerja sebagai non-karyawan. Berikut hasil uji analisis t-test independen terhadap variabel gender dan jenis pekerjaan.

Tabel 4. Hasil Uji T-test Independen pada Variabel Gender

Independent Samples Test						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
Skor_Gender	Equal variance assumed	0,394	0,531	-1,182	98	0,240
	Equal variance not assumed			-1,182	96,774	0,240

Sumber: Olahan data (2022)

Dari hasil uji t-test independen di atas didapatkan nilai signifikansi dari gender sebesar 0,531. Dimana nilai signifikansi  $0,531 > 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bergender perempuan dengan wajib pajak yang bergender laki-laki. Sehingga H1 pada penelitian ini ditolak.

Tabel 5. Hasil Uji T-test Independen pada Variabel Jenis Pekerjaan

Independent Samples Test						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
Skor_Pekerjaan	Equal variance assumed	26,186	0,000	3,768	98	0,000
	Equal variance not assumed			3,768	83,346	0,000

Sumber: Olahan data (2022)

Dari hasil uji t-test independen di atas didapat bahwa nilai signifikansi dari jenis pekerjaan sebesar 0,000. Dimana nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berkerja sebagai karyawan dengan wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai non-karyawan. Sehingga H2 dari penelitian ini diterima.

### Uji Kruskal Wallis

Pada penelitian ini uji kruskal wallis digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan berdasarkan tingkat pendidikan SMA-Sederajat, Diploma 3, Sarjana atau Diploma 4, serta tingkat pendidikan Magister. Berikut hasil dari pengujian menggunakan kruskal wallis

Tabel 6. Hasil Uji Kruskal Wallis pada Variabel Tingkat Pendidikan

Test Statistics	
	Skor_Pendidikan
Kruskal-Wallis H	14,214
Df	3
Asymp. Sig	0,003

Sumber: Olahan data (2022)

Hasil uji kruskal wallis di atas menunjukkan bahwa nilai asymp.signifikansi dari tingkat pendidikan adalah sebesar 0.003. Dimana nilai signifikansi  $0,003 < 0,05$ , hal ini menunjukkan terdapat perbedaan signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan antara tingkat pendidikan SMA-Sederajat, Diploma 3, Sarjana atau Diploma 4 serta tingkat pendidikan Magister. Sehingga H3 dari penelitian ini diterima.

## **Pembahasan**

### **Perbedaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan gender**

Penelitian ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut diketahui dari nilai signifikan uji t-test independen sebesar 0,531, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dengan begitu hipotesis ini ditolak. Data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner juga menggambarkan bahwa dari 50 responden perempuan 32 orang diantaranya melaporkan SPT mereka sebelum tanggal 31 Maret, sedangkan 18 orang lainnya melaporkan sesudah tanggal 31 Maret. Selanjutnya untuk 50 orang responden laki-laki menunjukkan bahwa 38 melaporkan SPT pajak sebelum tanggal 31 Maret dan 12 lainnya melaporkan sesudah tanggal 31 Maret. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara perempuan dan laki-laki tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam memenuhi perpajakannya.

Terlepas dari faktor yang menunjukkan bahwa perempuan bertindak dengan hati nuraninya dan memiliki rasa bersalah jika tidak membayar pajak dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, dan wajib pajak laki-laki yang lebih menekankan pada ketakutan terhadap sanksi yang diberlakukan, wajib pajak yang patuh akan senantiasa menaati kewajiban mereka sebagai warga Negara yang baik [6]. Namun adapun keterangan dari beberapa responden pada penelitian ini, gender bukanlah faktor yang akan membedakan tingkat kepatuhan seseorang. Terlepas dari perempuan atau laki-laki, kewajiban tetaplah kewajiban yang harus dilakukan dan ada sanksi yang dikenakan jika tidak memenuhi kewajiban tersebut. Keterangan dari beberapa responden juga menunjukkan sanksi merupakan hal yang membuat para wajib pajak untuk patuh dan taat, karena tidak ingin memperumit urusan mereka dengan pemerintah hanya karena tidak patuh dalam membayar pajak.

Hasil pengujian hipotesis tidak adanya perbedaan kepatuhan wajib pajak berdasarkan gender sejalan dengan penelitian yang dilakukan Handayani [5] dimana kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh gender, dimana ketidakberpengaruhannya tersebut juga menggambarkan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan antara laki-laki dan perempuan sehingga H1 ditolak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fitriyani, Dkk [3] bahwa gender tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan seseorang, namun menurut Suryati [9] gender dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang, yang berarti terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara laki-laki dan perempuan, sehingga hasil penelitian Suryati tersebut tidak sejalan dengan penelitian ini.

### **Perbedaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan jenis pekerjaan**

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara wajib pajak yang bekerja sebagai

karyawan dengan non-karyawan. Hal tersebut diketahui dari nilai signifikansi uji t-test independen sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dari data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner tersebut menunjukkan bahwa dari 50 orang responden yang bekerja sebagai karyawan 41 diantaranya melaporkan SPT sebelum tanggal 31 Maret, sisanya sebanyak 9 orang melaporkannya sesudah tanggal 31 Maret. Sedangkan untuk 50 responden yang bekerja sebagai non-karyawan 29 orang diantaranya melaporkan SPT sebelum tanggal 31 Maret, dan 21 orang lainnya melaporkan sesudah tanggal 31 Maret.

Pelaporan pajak tahunan orang pribadi merupakan kewajiban masing-masing wajib pajak, tidak melihat kepada jenis pekerjaannya. Namun pada wajib pajak karyawan, biasanya di tempat mereka bekerja, ada rekan-rekan kerja yang akan saling mengingatkan untuk pelaporan SPT Tahunan ketika telah memasuki periode pelaporan. Terkadang dari bagian keuangan perusahaan juga mengingatkan karyawannya untuk segera melaporkan SPT Tahunan mereka. Sehingga wajib pajak karyawan lebih tepat waktu dalam pelaporan pajaknya.

Sedangkan pada non karyawan, mereka terbiasa menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Mulai dari menghitung, menyetor, hingga melaporkan pajaknya sendiri. Semua proses yang dilaksanakan secara mandiri tersebut, jika ditambah dengan ketidakpahaman dan kurangnya kesadaran pribadi, maka akan membuat mereka melalaikan kewajiban perpajakannya. Sehingga wajib pajak non karyawan lebih sering tidak tepat waktu dalam pelaporan pajaknya.

Dari keterangan beberapa orang responden juga membuktikan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan antara wajib pajak yang bekerja sebagai karyawan dengan non-karyawan. Hal ini terjadi karena sistem yang terdapat pada perusahaan dimana pajak dari seorang karyawan akan dipotong secara otomatis oleh perusahaan dan adanya pihak ketiga dalam mengingatkan atau membantu dalam pelaporan SPT. Sedangkan mekanisme ini tidak terdapat pada wajib pajak non-karyawan.

Menurut Fitriyani et al. [3] kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh jenis pekerjaan mereka, dimana pendapat ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Dengan begitu dapat dibuktikan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak berdasarkan jenis pekerjaan, sehingga H2 diterima. Hasil ini tidak sejalan dengan pendapat Panastuti [7] yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh latar belakang pekerjaan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak seseorang.

### **Perbedaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan tingkat pendidikan**

Berdasarkan nilai uji kruskal wallis sebesar 0,003 dimana nilai tersebut kecil dari 0,05 membuktikan bahwa perbedaan tingkat pendidikan memberikan perbedaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hasil ini didukung oleh jawaban responden melalui kuesioner, yaitu dari 18 orang responden yang berpendidikan SMA/SMK-Sederajat, 6 diantaranya melaporkan SPT sebelum tanggal 31 Maret, sedangkan 12 responden lainnya melaporkan SPT sesudah tanggal 31 Maret. Selanjutnya 35 responden yang berpendidikan Diploma Tiga, 24 diantaranya melaporkan SPT mereka sebelum tanggal 31 Maret dan 11 orang lainnya melaporkan sesudah tanggal 31 Maret.

Diantara 42 responden dengan tingkat pendidikan Sarjana/Diploma Empat menunjukkan bahwa 35 responden melaporkan SPT mereka sebelum tanggal 31 Maret, sedangkan 7 orang lainnya melaporkannya sesudah tanggal 31 Maret. Untuk 5 orang responden yang berpendidikan Magister, semua responden melaporkan SPT sebelum tanggal 31 Maret. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban ketika ia memiliki pendidikan yang lebih tinggi.

Pendidikan formal yang ditempuh seseorang akan membentuk nilai bagi individu dalam menerima hal baru, dimana penyerapan informasi dan pengimplementasian perilaku dan gaya hidup akan lebih mudah dilakukan oleh seseorang atau masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dibandingkan tingkat pendidikan yang rendah. Wajib pajak yang memiliki pendidikan yang tinggi akan lebih mengetahui kewajiban perpajakan mereka. Namun tingginya pendidikan seseorang belum tentu akan menjadi ia sebagai wajib pajak yang patuh, hal ini dikarenakan adanya pemanfaatan celah dan kelengahan pajak yang dilakukan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan dasar memiliki pendidikan yang lebih tinggi [9].

Penelitian ini juga membuktikan bahwa kesadaran seseorang untuk membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang tinggi, dengan kesadaran tersebut akan membuat wajib pajak terdorong untuk memenuhi perpajakannya. Tingkat pendidikan yang tinggi membuat pola pikir dan cara tingkah lakunya lebih maju dan berkembang, dengan begitu individu yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah memahami suatu konsep dibandingkan individu yang berpendidikan rendah. Tingkat pemahaman yang tinggi tentu akan mempermudah individu untuk melaksanakan kewajibannya, termasuk kewajiban dalam membayar dan melaporkan pajak. Namun tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman yang tinggi tidak cukup untuk memenuhi kepatuhan perpajakan tersebut, rasa bersalah atas ketidakpatuhan dan rasa takut akan sanksi yang didapatkan, tentu sangat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Sosialisasi yang memadai dan merata akan membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Tidak hanya bagi masyarakat yang berpendidikan rendah, namun masyarakat yang tidak pernah mempelajari perpajakan tentu akan terbantu dan paham dengan adanya sosialisai perpajakan tersebut. Sehingga masyarakat akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian Fitriyani et al. [3] bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan panastuti [7] dimana hasil penelitiannya menunjukkan tingkat pendidikan seseorang tidak mempengaruhi kepatuhan seseorang untuk membayar pajak, dengan begitu bisa dikatakan bahwa tidak juga perbedaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maupun yang rendah.

## **Kesimpulan Dan Saran**

### **Kesimpulan**

Dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa tidak terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu berdasarkan gender. Gender bukanlah faktor yang akan membedakan tingkat kepatuhan seseorang. Terlepas dari perempuan atau laki-laki, kewajiban tetaplah kewajiban yang harus dilakukan dan ada sanksi yang dikenakan jika tidak memenuhi kewajiban tersebut.
2. Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu berdasarkan jenis pekerjaan. Karyawan akan lebih patuh karena sistem yang terdapat pada perusahaan dimana pajak dari seorang karyawan akan dipotong secara otomatis oleh perusahaan dan adanya pihak ketiga dalam mengingatkan atau membantu dalam pelaporan SPT. Sedangkan mekanisme ini tidak terdapat pada wajib pajak non-karyawan.
3. Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu berdasarkan tingkat pendidikan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kesadaran seseorang untuk membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang tinggi, dengan kesadaran tersebut akan membuat wajib pajak terdorong untuk memenuhi perpajakannya. Tingkat pendidikan yang tinggi membuat pola pikir dan cara tingkah lakunya lebih maju dan berkembang, dengan begitu individu yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah memahami suatu konsep dibandingkan individu yang berpendidikan rendah.

Sosialisasi yang memadai dan merata akan membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Tidak hanya bagi masyarakat yang berpendidikan rendah, namun masyarakat yang tidak pernah mempelajari perpajakan tentu akan terbantu dan paham dengan adanya sosialisasi perpajakan tersebut. Sehingga masyarakat akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Keterbatasan penelitian**

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan wilayah sampel atau populasi yang digunakan hanya di KPP Pratama Padang Satu.
2. Pemilihan sampel tidak mempertimbangkan tingkat penghasilan dan lingkungan kerja.

## Saran

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menerima saran yang diberikan sehubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Menambah variabel yang dapat memberikan perbedaan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak mereka seperti keperluan atau kepentingan wajib pajak, penggunaan fitur pajak online, dan tingkat pendapatan.
2. Melakukan kombinasi pengujian antar variabel, dimana agar dapat mewakili populasi yang lebih luas, peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah daerah populasi yang digunakan.
3. Mempertimbangkan tingkat penghasilan dan lingkungan kerja dalam memilih sampel.

## REFERENSI

- [1] Amilin, A., & Yusronillah, F. (2009). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Jenis Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Motivasi Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Darmajaya*, 7(3), 28–43.
- [2] Balai Diklat Keuangan, B. (2017). KONSEP GENDER. Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-balikpapan-konsep-gender-2019-11-05-b639e2fd/>
- [3] Fitriyani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., & Hizazi, A. (2014). Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *InFestasi*, 10(2), 115–122.
- [4] Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [5] Handayani, D. P. (2017). Pengaruh Sosial Kemasyarakatan, Gender, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada UMKM di Kota Malang).
- [6] Nugraha, G. A. D. (2019). Pengaruh Gender, sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas di Kota Surabaya. 1–19.
- [7] Panastuti, I. S. (2021). Pengaruh pendidikan, latar belakang pekerjaan dan motivasi terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di kpp pratama surakarta.
- [8] Pratiwi, R. (2022). Ini Perbedaan Cara Berpikir Perempuan dan Laki-Laki. Hallo Sehat. <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/perbedaan-cara-berpikir-perempuan-dan-laki-laki/>

- [9] Suryati. (2019). Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, Status Pernikahan, dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Khusus Pada KPP Pratama Kota Tegal). 8(5), 55.
- [10] Syafi'i. (2012). Kajian Empiris Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penyebabnya. Jurnal WIGA, 2(2), 57–65.
- [11] Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. In Simposium Nasional Keuangan Negara 2020 (p. 677).
- [12] Naufal, M.F., Setiawan P.E., (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.25.1.Oktober (2018): 241-271